

PEMKAB SOSIALISASI PERBUP PROTOKOL KESEHATAN

Tak Mengenakan Masker Dikenai Sanksi

WONOSARI (KR) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan antispasi penyebaran virus Covid -19 dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 yang mengatur tentang penerapan protokol kesehatan dan wajib mengenakan masker bagi masyarakat Jumat (11/9). Dalam perbup tersebut juga mengatur tentang sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran perbup. "Sosialisasi kami lakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Gunungkidul, Sugito, Jumat (11/9) kemarin.

Pusat konsentrasi masyarakat dan fasilitas umum yang dimungkinkan padat oleh aktifitas warga bakal menjadi sasaran target operasi ini. Mereka yang didapatkan tidak menggunakan masker ataupun tidak mematuhi aturan protokol kesehatan akan diberikan tindakan tegas

dan tentunya dengan penerapan sanksi bagi para pelanggarnya."Nanti akan ditindak sesuai Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2020 yang telah disepakati dan disahkan," ujarnya.

Terpisah Wakapolres Gunungkidul, Kompol Joko Hamitoyo menambahkan, imbauan penggunaan masker akan terus dilakukan kepada masyarakat. Tidak dipungkiri, sekarang ini masih banyak orang yang abai dan tidak mengenakan masker saat beraktifitas atau bepergian.

Imbauan secara serentak akan terus dilakukan. Untuk operasi gabungan nanti tergantung pemerintah dan hal tu pasti dilakukan.Saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum maupun instansi lainnya juga mulai gencar lagi dalam membagikan masker gratis.

"Kami berharap tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengenakan masker tinggi di Gunungkidul," pungkasnya.

(Bmp)-f

PENANGANAN COVID-19 DIKEMBALIKAN KE OPD
Posko Dekontaminasi Dikosongkan

PENGASIH (KR) - Posko Dekontaminasi di halaman samping Taman Budaya Kulonprogo (TBK) Kulonrogo mulai dikosongkan. Penanganan pencegahan Covid-19 dikembalikan ke Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Dari pemantauan, di Posko Kontaminasi telah terlihat sepi. Tinggal berdiri beberapa tenda dan satu mobil Ambulans BPBD. Tidak ada lagi aktivitas dekontaminasi atau sterilisasi personil, peralatan maupun ambulans pasca penanganan Covid-19.

"Terhitung mulai September, posko di PUSDALOPS BPBD Kulonprogo. Kekuatan personil masih sama meliputi unsur BPBD, Kodim, Polisi, PMI dan para relawan," ujar Ariadi, Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo.

Menurutnya, tugas posko di PUSDALOPS BPBD tetap melakukan penan-



KR-Agussutata

Posko Dekontaminasi di samping TBK Kulonprogo mulai dikosongkan.

nganan pencegahan penyebaran virus Korona. Penanganan dengan sistem *on call* untuk dekontaminasi rumah dan lingkungan warga dan pemakaman jenazah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) terkonfirmasi Covid-19.

Sementara di tengah masa persiapan pemulihan, katanya Dinas Kesehatan dan OPD terkait mengedukasi masyarakat dalam kehidupan untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Termasuk prosedur pemakaman jenazah terkonfirmasi Covid-19.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo, Edi Wibowo mengungkapkan kekuatan posko yang bertugas di PUSDALOPS BPBD sama dengan personil di Posko Dekontaminasi.

Tugasnya mendekontaminasi rumah atau lingkungan warga dan pemakaman jenazah terkonfirmasi Covid-19. Personil posko tidak melakukan dekontaminasi personil, peralatan dan ambulans pasca dipergunakan untuk pelayanan penanganan Covid-19.

(Ras)-f

KELUHAN MASYARAKAT MELALUI E-LAPOR
Bansos Covid-19 Salah Sasaran

WONOSARI (KR) - Volume keluhan masyarakat melalui layanan publik yang dibuka Pemkab Gunungkidul terus mengalami peningkatan sejak pandemi dan sejak bulan Maret hingga Agustus 2020 ini terdapat puluhan keluhan masyarakat yang dipublikasikan melalui laman e-lapor.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Kabupaten Gunungkidul, Didik Handoko mencatat terdapat sekitar 90 laporan masyarakat yang mengeluhkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19. "Banyak masyarakat yang menanyakan tentang bantuan yang dianggap salah sasaran," katanya, Kamis (10/9).

Dari sejumlah laporannya masyarakat memang tidak hanya menyangkut tentang keluhan dan penilaian tentang bantuan

sosial yang dinilai salah sasaran tetapi juga bermacam-macam keluhan.Laporan dari masyarakat ini langsung diteruskan kepada instansi terkait dan langsung ditindaklanjuti. Sedangkan yang terkait dengan bansos memang lebih banyak disampaikan pada saat Covid-19 ini, semua aduan seluruhnya sudah terjawab, dijawab langsung oleh Dinas Sosial.

Adapun mekanisme pelaporan, masyarakat bisa masuk ke laman <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-gunungkidul>. Kemudian langsung login dan menulis instansi yang dituju untuk pengaduan.

"Petugas yang menerima laporan langsung meneruskan ke OPD dengan harapan agar laporan secara terbuka melalui pelayanan publik di Gunungkidul bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

(Bmp)-f

MUSALA/MASJID TK/SD/SMP

Baznas Menyalurkan Rp 920 Juta

NANGGULAN (KR)-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kulonprogo mentasyarufkan/menyalurkan bantuan rehabilitasi musala/masjid 42 satuan pendidikan senilai Rp 920 juta. Penyerahan dilakukan Ketua Baznas Drs H Abdul Madjid kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Arif Prastowo SSos MSI, yang selanjutnya diserahkan oleh Bupati Sutedjo kepada tujuh penerima di SMP N 2 Nanggulan, Rabu (9/9).

Arif Prastowo menyampaikan, bantuan dari Baznas sebesar Rp 920 juta untuk rehab musala/ masjid di 42 satuan pendidikan terdiri 6 unit TK, 32 unit SD, dan 4 unit SMP. Besaran bantuan berbeda-beda antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta. "Kami berterima kasih atas dukungan dan semangat saling mengingatkan berzakat, bersodaqoh dan



KR-Widiastuti

Abdul Madjid serahkan bantuan kepada Arif Prastowo disaksikan Bupati Sutedjo.

berinfak. Dimulai dari sedikit, hingga mencapai tahun 2019 sebanyak Rp 5,4 miliar (khusus dari lingkup Dinas Dikpora)," ujar Arif.

Bupati Sutedjo berharap bantuan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari Baznas Kulonprogo dalam menunjang kegiatan keagamaan di sekolah. "Saya berharap setelah bantuan ini diterapkannya, maka setiap unsur dari sekolah merasa handarbeni terhadap masjid

atau musala yang ada," pinta Sutedjo.

Sementara itu, Senin (7/9) lalu Baznas juga membantu tiga warga Clapar 2 Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap. Penyerahan bantuan sejumlah Rp 6 juta atau @ Rp 2 juta dilakukan Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo. Ketiga warga penerima masing-masing Sumadi, Suwito yang lumpuh bertahun-tahun, serta Miyem.

(Wid/Rul)-f

H SUNARYANTA BERTEMU GUSTI ANING

Ajak 'Wong Cilik' Nikmati Kuliner Taman Parkir

WONOSARI (KR) - Suasana politik Pilkada di Gunungkidul diwarnai pertemuan bakal calon bupati (bapaslon) H Sunaryanta dengan GRM Hertriasning atau Gus Aning. Keduanya terlihat ngobrol santai di kuliner taman parkir Komplek Pasar Argosari Wonosari.

Pertemuan ini bermula dari kegiatan Gusti Aning di Pantai Sadeng, Jumat (11/9), selanjutnya pada sore bertemu sambil makan dengan H Sunaryanta di Kuliner Taman Parkir. Bahkan masyarakat baik itu pengamen, tukang ojek dan warga di sekitar taman kuliner diajak untuk makan bersama. Keduanya terlihat cukup asyik Ngobrol, termasuk berbincang tentang Gunungkidul menghadapi Pilkada 2020. "Semoga calon bupati sehat, sukses, lancar dan dapat memperoleh aman dengan baik. Serta tetap menjaga persatuan

dan kesatuan," kata Gusti Aning usai pertemuan.

Diungkapkan, para bapaslon diharapkan bisa mendukung kampanye yang damai. Tidak saling berbuat yang tak baik. Pertemuan dengan H Sunaryanta juga bukan yang pertam kali. Karena sudah sering bertemu. Untuk pertemuan di taman parkir ini, karena sebelumnya terdapat acara di Sadeng, berupa petik laut, Sehingga mampir di Wonosari untuk makan dan bertemu dengan H Sunaryanta. "Dengan H Sunaryanta sudah sering ketemu, ngobrol dan menik-



KR-Dedy EW

H Sunaryanta-Gusti Aning menyapa pedagang di Taman Parkir Wonosari.

mati kuliner," imbuhnya.

Pertemuan dua tokoh inipun menarik perhatian masyarakat. Baik pedagang, tukang parkir, tukang ojek dan warga yang melintas. Bahkan sejumlah warga juga mengajak H Sunaryanta dan Gusti Aning untuk berfoto bersama.

H Sunaryanta usai pertemuan menuturkan, Gus-

ti Aning merupakan kawan lama dan sudah sering bertemu. Beliau merupakan budayawan, seni dan banyak kegiatan di wilayah selatan Gunungkidul. Termasuk dekat dengan nelayan. Tentu berbagai program yang sudah beliau lakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat Gunungkidul.

(Ded)-f

BTP LANJUTKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI LAHAN BANDARA

Gunakan Uangnya untuk Investasi

TEMON (KR) - Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo, Fajar Gegana inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan proses pembayaran ganti rugi lahan bagi warga terdampak proyek pembangunan trase kereta api Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa di Balai Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon.

Warga penerima uang ganti rugi diimbau agar mereka menggunakan uangnya untuk keperluan yang bermanfaat dan jangan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak penting. "Uang ganti rugi akan lebih bermanfaat digunakan untuk berinvestasi salah satunya membeli tanah atau lahan baru," tegas Fajar, Jumat (11/9).

"Dalam rapat virtual baru-baru ini, Pak Menteri Perhubungan menghendaki permasalahan pembebasan lahan jalur KA bandara

segera selesai," ungkapnya.

Kabid Pengadaan Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Agustinus Imbiri mengatakan, proses pembayaran ganti rugi lahan diperkirakan selesai September. Adapun proses pembayaran ganti rugi bagi warga terdampak pembangunan jalur KA YIA di Temon, diketahui sudah hampir selesai. Dari total 560 bidang lahan terdampak di tiga Kalurahan Kaligintung, Kalidengen dan Kalurahan Glagah, tercatat 485 bidang sudah dibayarkan sementara sisanya 75 bidang, ditargetkan terbayarkan September 2020. Dari 75 bidang tersebut, 35 tanah milik perorangan dan 40 tanah merupakan milik instansi.

"Sekarang masih dalam proses pendataan, harapan kami bisa segera dibayarkan bulan ini," ungkap Agustinus menambahkan pembayaran di Kalurahan Kaligintung pada Rabu 9



KR-Asrul Sani

Wabup Fajar Gegana (kanan) memantau langsung proses pembayaran ganti rugi lahan jalur KA bandara.

September lalu, merupakan tahap ke delapan dengan luas lahan 75 bidang.

Menurutnya, pembayaran tanah milik perorangan tidak menemui kendala berarti sedangkan tanah instansi diakuinya memang agak sulit karena harus mengurus izin terlebih dahulu. Seperti tanah kas desa, harus mengurus izin dulu ke Pemkab dan Pemda DIY. Untuk tanah hibah NU dan Muhammadiyah,

sertipikat tanah hibah juga harus selesai terlebih dahulu.

"Kami berupaya pembayaran ganti rugi lahan secara langsung tanpa melalui konsinyasi di pengadilan karena membutuhkan waktu cukup lama, dikawatirkan nilai tanah berubah naik. Tren harga tanah kan terus naik, kami berupaya maksimal agar proses pembayaran tidak melalui konsinyasi," harapkan.

(Rul/Ras)-f

PEMBANGUNAN PLAZA KULINER

Dispar Tata Kawasan Obwis Glagah

WATES (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo memulai penataan kawasan objek wisata (Obwis) Pantai Glagah di Kapanewon Temon. Mengawali penataan di masa pandemi Covid-19 dengan membangun pusat makanan olahan atau plaza kuliner yang ditargetkan dapat diselesaikan di akhir 2020.

Informasi yang berhasil dihimpun di Dispar Kulonprogo, Jumat (11/9) menyebutkan pembangunan plaza kuliner menjadi bagian dari penataan kawasan obwis pantai dengan adanya Yogyakarta International Airport (YIA).

Penentuan lokasi plaza kuliner dekat pintu masuk Obwis Pantai Glagah, sebelah selatan dermaga wisata. Lima bangunan utama yang akan dibangun diperkirakan mam-

pu menampung sekitar 50 pelaku wisata kuliner.

"Sesuai perjanjian dalam kontrak, perusahaan kontraktor pemenang lelang memulai pekerjaan pembangunan September ditargetkan selesai akhir 2020," ujar Muh Juaini, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dispar Kulonprogo.

Hal tersebut disampaikan di ruang kerjanya menjelang pelaksanaan sosialisasi rencana pekerjaan pembangunan plaza kuliner kepada para pelaku wisata di Obwis Pantai Glagah. Untuk biaya pembangunan plaza kuliner sekitar Rp 5,7 miliar bersumber dari alokasi cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2020.

Menanggapi rencana pembangunan plaza kuliner, sejumlah pelaku

wisata Obwis Pantai Glagah mengharapkan pemerintah mengintensifkan pendekatan dalam rangka mensosialisasikan penataan kawasan wisata pantai secara menyeluruh.

Salah satu petugas retribusi masuk Obwis Pantai Glagah, Agus Subiyanto menjelaskan masyarakat mendukung terhadap rencana penataan kawasan wisata pantai. Penjelasan penataan tidak lengkap atau sepotong-sepotong mensikapi berbeda terhadap rencana tersebut.

"Perlu melakukan pendekatan dengan para pelaku wisata. Sosialisasi penataan kawasan pantai disampaikan secara menyeluruh sehingga pemahaman tidak sepotong-sepotong," ujarnya.

(Ras)-f

PETANI MENGUBAH POLA TANAM

Kuota Pupuk Bersubsidi Dikurangi

WONOSARI (KR) - Jumlah kuota pupuk subsidi yang diterima Kabupaten Gunungkidul tahun ini kembali mengalami pengurangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Kepala Bidang Tanaman Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ada perubahan dan pengurangan kuota pupuk bersubsidi yang disalurkan ke Kabupaten Gunungkidul. "Adanya perubahan kedua, Gunungkidul mendapatkan alokasi 9.777 ton pupuk urea namun adanya perubahan ketiga menjadi 5.837 ton," katanya, Kamis (10/9) kemarin.

Dengan adanya pengurangan kuota pupuk tersebut maka untuk meningkatkan kesuburan tanaman para petani mengubah pola penggu-

naan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Sementara untuk jenis pupuk SP-36 dari 584 ton jadi 454 ton, pupuk ZA dari 738 menjadi 632 ton. Selanjutnya NPK dari 6.526 ton berubah menjadi 4.289 ton dan pupuk organik bersubsidi dari pemerintah semula sebanyak 228 ton menjadi 181 ton. "Untuk realisasi penyaluran sendiri ada yang 59 persen bahkan sampai 80 persen sudah disalurkan ke petani di Gunungkidul untuk menunjang pemupukan tanaman pertanian petani," imbuhnya.

Tahun lalu, pemerintah Gunungkidul juga mendapatkan pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Sebernarnya penurangan kuota pupuk ini bukan menjadi masalah yang besar bagi para petani. Sebagai solusinya sekarang ini petani sebagian mulai beralih dengan menggu-

nakan pupuk non kimia. Sebagai contohnya pemanfaatan pupuk kandang dan pupuk kompos."Sudah mulai banyak petani yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik," ucapnya.

Saat ini, di Gunungkidul sudah ada asosiasi pupuk organik sebanyak 22 kelompok yang setiap tahun terus memproduksi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanaman mereka.Untuk produksi pupuk kompos per tahunnya bisa mencapai 10 sampai dengan 30 ton. Bisa untuk mencukupi kebutuhan petani, kemudian untuk pupuk kandang sendiri juga banyak.

"Estimasi kami populasi sapi ada 150.000 ekor dengan produksi kotoran 20 kilogram per hari," terangnya.

(Bmp)-f